

# MENUJU SISTEM EKONOMI PANCASILA

Christianto WIBISONO

Proklamator Bung Hatta dalam ceramah pada peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 1977 menyatakan dengan tegas : "Camkanlah, negara Republik Indonesia belum lagi berdasarkan Pancasila, apabila Pemerintah dan masyarakat belum sanggup mentaati Undang-Undang Dasar 1945, terutama belum dapat melaksanakan pasal 27 ayat 2, pasal 31, pasal 33 dan pasal 34."

Penulis akan membahas masalah sistem ekonomi yang seyogyanya mencerminkan watak dan jiwa yang terkandung dalam falsafah Pancasila. Sistem ini berkaitan dan hanya dimungkinkan tumbuh sehat dalam Sistem Politik yang juga harus dijiwai oleh falsafah Pancasila. Tentang Sistem Politik lebih tepat diuraikan dalam naskah tersendiri/terpisah. Marilah kita coba pikirkan suatu kerangka Sistem Ekonomi Pancasila.

Patokan pertama yang harus kita pegang adalah bahwa kita tidak bisa menghindari dari hukum alam berupa teori bandul/pendulum. Bangsa dan negara Indonesia pada tahun 1960-1965 menaiki mobil yang kemudinya dibanting ke kiri oleh sopirnya sampai terperosok ke lembah kemerosotan ekonomi. Secara refleksi mobil Republik kemudian dibanting ke kanan. Secara obyektif harus diakui, bahwa bila kita telah memutar setir ke kiri, untuk mengembalikan ke tengah, harus dibanting ke kanan sekuat tenaga. Dalam proses inilah secara tidak disengaja kita terlanjur menyeleweng ke kanan. Secara realistis kita harus mengakui bahwa dibutuhkan bantuan luar negeri untuk meng-

ungkit ekonomi Republik yang sangat merosot dan mengembalikannya pada tingkat yang normal.

Karena itu demi obyektivitas yang tidak memihak dan tidak a priori mengkritik Pemerintah, kita harus memperbaiki dan menemukan jalan ke luar yang baik dalam mengembalikan perekonomian kita ke jalan yang benar, jalan lurus di tengah, yaitu jalan Pancasila. Kita tidak perlu terlalu mencari kambing hitam dan menyalahkan pihak lain padahal sebagian dari kita juga sudah ikut mengecap hasil dari politik pembangunan ekonomi kita yang sekarang ini.

Dalam memberikan koreksi dan kritik inilah, maka kita harus tetap berpegang kepada prinsip mendahulukan kepentingan nasional di atas segala-galanya. Sekalipun tidak dalam kerangka konfrontatif seperti di masa lalu, kita harus sadar bahwa ekonomi nasional kita sebagaimana ekonomi dari negara-negara berkembang lainnya, dihadapkan kepada tantangan serius modal asing, ketergantungan teknologi dan pasaran serta pengaruh pola konsumsi tinggi dari negara-negara industri. Tidak ada orang yang akan menolong kita kecuali diri kita sendiri. Kita harus memperkuat terus-menerus posisi tawar-menawar kita dengan memberikan bobot kepada kekuatan yang kita miliki. Ketahanan Nasional di segala bidang memang diperlukan, terlebih lagi di bidang ekonomi, sebab justru disinilah perjuangan sekarang sedang berlangsung antara modal dan kekuatan ekonomi nasional dalam persaingan dengan modal dan teknologi asing yang berskala raksasa.

Marilah kita bahas semua itu dengan mendalam.

### I. EKONOMI INDONESIA SEBAGAI BAGIAN EKONOMI DUNIA

Apabila kita berbicara tentang ekonomi Indonesia, maka orang tidak bisa mengingkari bahwa ekonomi Indonesia haruslah merupakan bagian aktif dan inheren dalam struktur ekonomi dunia. Istilah autarki yang bersifat teoritis dalam ilmu

ekonomi abad XIX jelas sudah tidak mungkin lagi, sekalipun diganti dengan istilah berdikari. Suatu sistem ekonomi dunia menganut asas ketergantungan atau interdependency. Yang maksimal harus kita usahakan adalah agar ketergantungan itu sifatnya simetris dan tidak terlalu timpang atau a-simetris.

Sebagai contoh, kita boleh saja tergantung dari Jepang untuk jenis barang tertentu misalnya mesin, asal kebalikannya Jepang juga tergantung dari kita untuk bahan baku. Tingkat ketergantungan serupa ini disebut symmetrical interdependency. Sebaliknya, bila ternyata hanya Indonesia yang bergantung kepada Jepang, tapi Jepang sendiri bisa hidup terus tanpa Indonesia, maka itu berarti kita berada pada hubungan kritis, a-symmetrical interdependency. Posisi kita berarti sangat lemah, sebab Jepang tidak memerlukan kita sebagaimana kita memerlukan Jepang.

Hal inilah yang harus kita camkan, yaitu usaha peningkatan daya mampu ekonomi nasional kita agar kita bisa meningkatkan terus-menerus potensi ekspor kita agar kita tidak terlalu tergantung kepada pasaran tertentu. Dalam perekonomian dunia sekarang ini sekalipun RRC tidak mampu mengisolir diri dan sudah melepaskan semboyan autarki yang tidak mungkin dicapai oleh negara manapun. Kita harus waspada agar usaha memperbaiki penyimpangan dalam politik ekonomi kita tidak menjurus kepada sesuatu yang ekstrem pula. Autarki dan berdikari sudah usang dan tidak tepat lagi. Yang penting adalah peningkatan ketahanan ekonomi nasional dan mengurangi tingkat ketergantungan sampai kepada suatu derajat yang berimbang dalam hubungan ekonomi kita dengan dunia internasional. Jelaslah bahwa dalam situasi interdependensi ini, ekonomi Indonesia tidak mungkin mengisolir diri secara kaku atau secara ekstrem dalam menghadapi modal asing.

Dalam mengadakan manouvre antara sistem ekonomi terbuka dan usaha meningkatkan ketahanan ekonomi nasional Indonesia inilah seluruh dana dan tenaga harus dikerahkan dalam rangka kepentingan nasional. Swasta nasional harus dibantu tapi juga harus membantu pemerintah. Pemerintah memerlukan dukungan dan partisipasi masyarakat untuk pe-



## ANALISA

ningkatan ketahanan ekonomi nasional. Masyarakat mengharapkan agar akses dari sistem ekonomi terbuka dengan persaingan bebas yang mempersempit ruang gerak pengusaha kecil seyogyanya diawasi dan dibatasi oleh pemerintah.

Selain itu, karena faktor kelangkaan modal maka kita juga harus hemat dan efisien. Penghamburan dan pemborosan seperti yang disinyalir Prof. Dr. Soemitro, waktu itu Menteri Riset, baik karena kealpaan maupun karena korupsi, dari potensi ekonomi nasional harus dihindarkan. Ini mengingatkan kita masih membutuhkan terus mengalirnya bantuan luar negeri apabila kita ingin mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi seperti yang dialami selama tujuh tahun terakhir. Hal itu berarti bahwa problem pembagian porsi antara modal asing dan nasional akan tetap merupakan masalah aktual di masa mendatang, sampai potensi nasional kita mampu menggantikan posisi modal asing. Disinilah pentingnya perencanaan pemerintah untuk menjamin proses pemupukan dan pembinaan modal nasional dalam peralihan struktur permodalan dari ekonomi Indonesia.

Pemerintah melalui penyesuaian peraturan mengenai penanaman modal sebetulnya telah mulai mengadakan pembatasan dan pengawasan dari peranan modal asing. Sebaliknya penanaman modal dalam negeri telah digalakkan dan dirangsang, walaupun timbulnya masalah latent (pribumi dan non pribumi) juga mengakibatkan hambatan dalam perkembangan investasi oleh modal nasional.

Tentang kebutuhan modal dari luar negeri ini angka yang tersedia barulah mengenai taksiran kebutuhan modal selama Pelita II. Menurut Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Drs. Barli Halim, maka selama Pelita II, dengan target pertumbuhan GDP sebesar 7,5% per tahun, diperlukan investasi sebesar Rp. 11,4 trilyun atau US \$ 28 milyar. Dari jumlah itu sekitar Rp. 8.200 milyar dipenuhi oleh tabungan dalam negeri, sisanya sebesar Rp. 3.200 milyar atau US \$ 8 milyar merupakan bantuan luar negeri. Dengan demikian rata-rata setiap tahun selama masa Pelita II saja dibutuhkan US\$ 1,6 milyar modal luar negeri. Diperkirakan sejumlah US\$ 1 milyar akan disediakan melalui bantuan pemerintah (atau Official

Development Assistance) dari negara-negara sahabat kepada RI. Sisanya sejumlah US \$ 600 juta masih harus dipenuhi dari penanaman modal swasta asing ke Indonesia.

Apabila taksiran kebutuhan modal dari luar negeri untuk masa Pelita II kita pakai sebagai pegangan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,5% rata-rata per tahun, untuk jangka pendek bahkan sampai di tahun 2000 pun ekonomi kita masih harus memperoleh tunjangan modal asing. Hal ini mengingat skenario pertumbuhan ekonomi Indonesia, suatu proyek penelitian yang dipimpin oleh Dr. Thee Kian-wie, mengisyaratkan suatu alternatif pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :

I.	1973 — 1980 : 7,35 %	II.	1973 — 1980 : 7,35 %	III.	1973 — 1980 : 7,35 %
	1980 — 1990 : 6,30 %		1980 — 1990 : 7 %		1980 — 1990 : 7,5 %
	1990 — 2000 : 6 %		1990 — 2000 : 7 %		1990 — 2000 : 8 %

Oleh Prof. Dr. Soemitro dianggap bahwa alternatif II merupakan laju yang realistis yang dapat dicapai (realizable) dari alternatif III sebagai suatu tingkat yang seyogyanya kita capai (desirable). Alternatif I jelas merupakan satu kemunduran dan kemerosotan tingkat pertumbuhan ekonomi yang harus dihindarkan jika kita tidak menginginkan ketegangan sosial. Proyek penelitian yang diadakan di bawah pengawasan Menteri Negara Riset dan dikepalai Dr. Thee Kian-wie ini sekarang masih dalam proses dan data maupun rekomendasinya belum siap untuk diketahui umum. Karena itu untuk sementara kita harus puas dengan asumsi bahwa tampaknya sampai tahun 2000 pun kita masih tetap membutuhkan bantuan luar negeri. Hanya saja, barangkali akan diusahakan untuk selanjutnya sifat komplementernya yang menonjol, sifat pelengkapannya dan bukan peranan dominan dari modal asing itu dalam perekonomian nasional kita.

Dengan demikian jelaslah bahwa untuk masa seperempat abad mendatang dunia usaha Indonesia secara obyektif masih harus meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus, di samping harus belajar hidup berdampingan dengan modal asing yang peranannya tidak bisa kita abaikan.

## ANALISA

Kita tidak perlu membuka perdebatan bertele-tele tentang pro dan kontra modal asing. Kita tidak perlu terlalu sloganistik mengadakan kampanye tentang usaha berdiri di atas kaki sendiri dan seterusnya apabila fakta yang berdasarkan data dan analisa kuantitatif yang konkrit memang mengharuskan kita untuk mengadakan symbiose dengan mekanisme ekonomi internasional. Berbicara tentang mekanisme ekonomi internasional maka faktor kekuatan modal dan teknologi sungguh-sungguh merupakan hal yang sangat sulit untuk dimanipulir.

Negara-negara sosialis pun dewasa ini sedang berbelanja secara besar-besaran di pasar modal dan teknologi dunia industri Barat. Ini tidak bisa dipungkiri oleh slogan ideologis yang kosong belaka. Kredit jangka panjang meliputi bermilyar dollar mengalir dari Jerman Barat, Jepang dan bahkan Amerika Serikat ke negara-negara Eropa Timur. Suatu ironi bagi perjuangan negara berkembang yang selalu menghantam dunia Barat dan memuja negara sosialis. Ternyata negara sosialis pun justru ikut memperebutkan fasilitas kredit dan investasi teknologi Barat yang mutlak diperlukan oleh negara berkembang.

Dalam pecaturan politik ekonomi internasional yang demikian itulah kita harus selalu mengadakan evaluasi yang serius dan mendalam terhadap strategi kita dalam mengemudikan kendali politik luar negeri dan politik kerjasama ekonomi kita.

Tampaknya memang kita selalu dihadapkan kepada dilemma-dilemma yang sangat pelik. Di satu pihak kita ingin menumbuhkan ketahanan ekonomi nasional, di lain pihak kita tidak bisa mengingkari ciri dunia saat ini, saling ketergantungan satu sama lain; persaingan yang Machiavelistis antara sesama negara berkembang serta kelemahan-kelemahan lain yang dieksploisir oleh kekuatan modal internasional.

Apabila kita mendalami dengan saksama posisi Indonesia sebagai bagian ekonomi dunia dengan ciri ketergantungan dan persaingan bebas, maka kita harus berusaha terus-menerus meningkatkan ketahanan ekonomi nasional kita agar kita mengurangi hubungan ketergantungan yang timpang serta sukses dalam persaingan internasional.



Jelaslah bahwa pandangan ekstrem untuk melarang atau menghentikan arus modal asing, selain hanya berbau slogan kiri juga tidak realistis menghadapi situasi dunia yang sudah berubah dibanding tahun 1960-an.

Apabila di bagian depan kami menyebut perlunya penyesuaian kemudi dari politik ekonomi nasional kita maka jelaslah bahwa kemudi ini tidak boleh dibanting lagi secara ekstrem ke pojok kiri. Sekarang kita harus membantu pemerintah untuk melempangkan kemudi yang meluncur ke kanan. Kita kembalikan ke tengah, ke jalan yang benar. Tapi harus waspada betul-betul, supaya kita tidak mengulangi kekeliruan atau gerak refleks yang berlebihan. Dari kecenderungan kanan menjadi tergelincir ke kiri.

Konkritnya, setelah kita memperhatikan dan mempelajari kelemahan-kelemahan dari arus masuknya modal asing ke dalam negeri, maka kita harus mengadakan pengawasan dan pembatasan serta pengaturan yang ketat tanpa menjadi ekstrem dan mengambil alih, mengusir atau menolak sama sekali unsur komplemen yang masih mutlak dibutuhkan itu. Terlebih pula mekanisme kerjasama internasional, mekanisme ekonomi dunia dewasa ini sedang menuju ke arah pengaturan saling ketergantungan ke arah usaha penyesuaian diri yang saling menguntungkan baik bagi negara industri maupun negara berkembang. Negara sosialis pun tidak mampu mengembangkan autarki. Pola perdagangan negara-negara sosialis pun membuktikan bahwa mereka membutuhkan hubungan dagang dan kerjasama ekonomi dengan negara Barat. Alternatif yang lain tentu saja bisa, tapi sudah usang dan menjadi tidak wajar seperti Kamboja sekarang atau Albania. Suatu isolasi yang sangat ketat bahkan tidak berperikemanusiaan. RRC sendiri dalam taraf pembangunannya sekarang mau tidak mau harus mengadakan interaksi dengan mekanisme ekonomi internasional. Suka atau tidak suka, Maoisme harus berdialog dengan gembong-gembong multinational corporation untuk mendapatkan teknologi barang industri mutakhir.

Karena itu dalam situasi makro seperti ini, pengusaha Indonesia pun harus siap dengan pikiran dan tenaganya untuk

## ANALISA

menyumbangkan kemampuan mereka dalam meningkatkan ketahanan ekonomi nasional menghadapi tantangan multinational corporation dan kekuatan ekonomi negara-negara besar. Sekedar menyalahkan pemerintah dan menuntut perlindungan berlebihan tanpa menunjukkan prakarsa dan sumbangan pikiran tentang bagaimana menghadapi kekuatan ekonomi asing untuk dijinakkan dan dimanfaatkan bagi peningkatan daya mampu ekonomi nasional kita, adalah kekeliruan yang harus ditinggalkan. Sekarang kita harus mampu menunjang pemerintah menghadapi tantangan situasi internasional.

## II. ANALISA PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI

Pasal 33 Undang-undang Dasar 45 secara gamblang menyebut ekonomi negara kita menganut sistem kekeluargaan. Sayang sekali mengingat kondisi lahirnya konstitusi kita, elaborasi yang lebih mendetail dari pasal tersebut belum sempat kita adakan, bahkan sampai kita memasuki usia 32 tahun sekarang ini. Semuanya itu tidak perlu dicari kambing hitamnya. Sistem Ekonomi Pancasila memang tidak bisa direalisasikan hanya melalui slogan dan bibir belaka. Ia menuntut persyaratan-persyaratan konkrit, perubahan-perubahan fundamental dari pola berpikir usang dan klasik, dan memerlukan adanya kemauan politik untuk merombak piramida struktur sosial ekonomi kita. Piramida ini merupakan struktur warisan kolonialisme Belanda. Perjuangan kemerdekaan yang harus diteruskan dengan pengisian kemerdekaan sebetulnya dapat dilukiskan dengan pernyataan lain, yaitu setelah perjuangan melawan penjajahan politik berakhir, dengan kemerdekaan Indonesia, perjuangan melawan penjajahan ekonomi berupa ketergantungan yang berlebihan dari sistem ekonomi nasional kita pada unsur asing harus diteruskan ke arah kedaulatan ekonomi.

Tetap berpegang kepada realitas bahwa kita harus saling bekerjasama dan saling merasakan ketergantungan tidak berarti bahwa kita harus sekedar 'nrimo' dengan keadaan yang masih timpang dalam kehidupan ekonomi kita. Kita realistis, karena itu kita tidak anti modal asing. Tapi kita juga realistis bahwa ekonomi kita masih 'vulnerable' terhadap faktor ekstern dan asing, karena itu kita harus terus-menerus meningkatkan ketahanan ekonomi kita.



Pada skala nasional kita harus merombak piramida struktur sosial ekonomi kita agar kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Bukan sekedar di bidang film atau pers, tapi juga dalam kedaulatan ekonomi. Karena itu apabila secara realistis kita melihat bahwa bidang-bidang ekonomi yang padat modal seperti pertambangan dan industri berat masih harus ditangani modal asing, kita wajib merencanakan pola pengalihan, baik dari segi kepemilikan dan permodalan maupun teknologi dan manajemennya. Apabila di masa lampau ekonomi Indonesia di puncaknya dimonopoli oleh perusahaan raksasa Hindia Belanda (The Big Five dan kawan-kawan), kemudian di tengah piramida sebagai 'buffer' ditempatkan pedagang perantara golongan Cina dan baru di dasar piramida golongan pribumi, maka sekarang ini harus dicegah re-inkarnasi dari piramida ekonomi kolonial itu kembali.

Apabila jalan Thamrin dan jalan Jenderal Sudirman di Jakarta ternyata kelak hanya merupakan markas dari kegiatan multinational corporation belaka, tanpa mampu memberikan kesempatan kepada perusahaan nasional secara wajar menduduki 'posisi jantung ekonomi Indonesia itu', maka itu berarti sudah komplitlah sirkulasi dari kembalinya struktur ekonomi kolonial. Kalau dulu hanya perusahaan Belanda, sekarang multinational corporation menggantikan peranan mereka.

Semua ini harus diatasi, bukan sekedar dengan kebencian dan tindakan hantam kromo. Masalah modal barangkali bisa kita atasi dengan kredit, teknologipun kita bisa membeli, tapi masalah sikap mental berusaha inilah yang harus ditumbuhkan, diperluas secara intensif dan ekstensif sekali. Dalam perjuangan Irian Barat, Presiden Soekarno almarhum telah mengambil alih modal Belanda tanpa persiapan aparaturnya dan ketrampilannya sama sekali. Hasilnya sangat mengecewakan, belasan perusahaan negara yang mewarisi jaringan dagang kolonial yang paling hebat di negara ini ternyata tidak mampu memelihara atau melanjutkan, bahkan jaringan distribusi itu hancur sama sekali. Kita tidak menghendaki politik hantam kromo demikian yang merugikan konsumen rakyat jelata dan seterusnya justru melemahkan potensi ekonomi Indonesia keseluruhan.

## ANALISA

Pemerintah telah mengusahakan perbaikan dalam perundang-undangan penanaman modal dengan memberikan perangsang kepada pengusaha nasional. Bahkan untuk mengatasi masalah sosiologis dari problem latent, yaitu golongan non pribumi, pemerintah pun secara sadar memberikan fasilitas khusus untuk mengangkat golongan pribumi. Itikad baik pemerintah untuk mengoreksi penyimpangan akibat masuknya modal asing sudah ditunjukkan. Sekarang justru pengusaha harus memperbaiki diri untuk memanfaatkan kelonggaran-kelonggaran yang telah diberikan pemerintah agar bisa mengambil alih secara bertahap peranan modal asing yang masih dominan di beberapa sektor kehidupan ekonomi kita.

Sebelum kita memasuki lebih lanjut masalah sikap mental tersebut yang akan menyangkut pembahasan filosofis terhadap dunia usaha, baiklah kita kembali menelaah masalah ruang lingkup dari usahawan kita, yaitu dalam struktur ekonomi Pancasila.

Konsultan Bank Dunia, Dr. Mahbub ul Haq yang pernah menjadi arsitek ekonomi Pakistan selama Ayub Khan berkuasa, setelah mempelajari masalah-masalah negara berkembang mengambil suatu kesimpulan yang dramatis.

Dua hal yang menonjol dari kesimpulan itu merupakan satu rangkaian yang berkaitan. Pertama, ialah kecenderungan negara berkembang untuk secara sloganistik menyebut sistem ekonomi mereka sebagai sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi sosialis yang berkepribadian, yang tidak menganut liberalisme Barat dan komunisme blok Timur. Celaknya, menurut Mahbub ul Haq, dalam menciptakan sistem yang disebut campuran dan berkepribadian itu, dengan mencangkok dari kedua belah pihak, ternyata secara tidak disengaja atau tidak dimengerti telah tercangkok dari kedua sistem hal-hal yang buruk dan ekstrem jelek saja. Efek-efek negatif dan ekses-ekses buruk dari kedua sistem itulah yang telah menjerumuskan negara berkembang ke dalam lingkaran setan ketidak-mampuan untuk 'take off'. Kondisi negara berkembang yang belum mapan aparatur dan mekanisme birokrasinya telah menjerumuskan negara berkembang kepada ekonomi keluarga, di mana hanya beberapa



puluh kelompok keluarga saja yang menikmati pembangunan ekonomi. Kombinasi feodalisme dengan kapitalisme yang tidak segera diimbangi dengan pengawasan dan pembatasan ketat. Atau pengawasan dan pembatasan itu macet karena kurang tegasnya penguasa setempat dalam menerapkan prinsip negara hukum. Akibatnya, kata Mahbub ul Haq, sekalipun Ayub Khan berbicara tentang Sosialisme Islam, yang muncul adalah oligarki politik dan ekonomi yang menjadi sebab musabab ketidak-puasan dan pecahnya revolusi Bangla Desh.

Karena kepahitan pengalamannya inilah, Mahbub ul Haq kemudian menyimpulkan bahwa dalam alam pembangunan negara berkembang yang memiliki penduduk dalam jumlah raksasa, sistem pembangunan yang terbaik untuk jangka panjang adalah sistem mobilisasi RRC.

Kita tidak perlu sependapat dengan Mahbub ul Haq, tapi analisisnya patut kita kaji dengan saksama. Kita harus berani mawas diri dan melihat kepada diri kita sendiri, tentang akibat sampingan dari proses pembangunan ekonomi kita saat ini. Bahwa ide pemerataan pendapatan adalah juga ide yang universal, yang tidak mungkin diabaikan begitu pula di Indonesia. Bahwa koreksi harus segera diadakan untuk mencegah akumulasi kekuasaan politik dan ekonomi pada kelompok oligarki tertentu yang bertentangan dengan falsafah Pancasila. Kita harus kritis menilai apakah falsafah Pancasila telah diterapkan, dalam kehidupan sehari-hari dalam mekanisme perekonomian nasional kita.

Sistem Ekonomi Pancasila dengan titik berat kepada keselarasan dan keserasian sebagaimana tersirat dalam istilah 'kekeluargaan' niscaya harus dijabarkan lebih konkrit agar tidak menjadi kabur pengertian maupun penerapannya. Sebagai contoh, sampai di mana sistem koperasi telah dibina dengan baik agar bisa mampu menjadi salah satu unit ekonomi dalam piramida struktur ekonomi kita sebagai salah satu komponen kekuatan ekonomi nasional. Koperasi di Indonesia secara obyektif belum memenuhi selera dan idaman kita. Mereka bahkan ketinggalan dari rekan-rekan koperasi dari negara-negara Barat seperti koperasi pertanian dan peternakan Eropa,



## ANALISA

Australia dan Amerika Serikat. Ini suatu ironi dan tragedi bagi bangsa yang berfalsafah Pancasila. Jika kita tidak mampu menghidupkan dan mengkreatifkan unit koperasi kita, maka kita tidak boleh terlalu sering menepuk dada dan berkata bahwa sistem ekonomi kita adalah yang terbaik dan bukan kapitalistis. Sloganisme ini harus diakhiri dan diganti dengan tindakan nyata. Di sini pun dibutuhkan perombakan sikap mental para pengurus koperasi dan warga masyarakat agar management koperasi di tangan mereka yang mampu berprestasi. Kita harus mengubah orientasi dari wadah belaka ke arah substansi positif. Tidak perlu kita malu untuk belajar dari sistem koperasi negara-negara Barat yang telah sukses dan berkembang walaupun di negara tersebut secara resmi berlaku sistem pasaran bebas, kapitalisme liberal yang asli.

Di samping itu mengingat bahwa sistem kapitalisme itu sendiri di negara asalnya telah mempunyai sistem pengawasan dan pembatasan yang mampu menjamin kontinuitas pembangunan bangsa, seyogyanya kita juga mempelajari teknik dan metode penjinakan kapitalisme.

Seratus tahun yang lalu Amerika Serikat sudah melihat gejala eksek dari kapitalisme berupa monopoli yang merugikan kepentingan rakyat banyak. Karena itu diundangkanlah *Anti Trust Act* untuk mencegah terjadinya persekongkolan harga dan monopoli pasar oleh kelompok-kelompok raksasa kaum industrialis AS. Sekalipun kelompok raksasa itu sama-sama satu bangsa dan satu negara, namun prinsip kepentingan umum toh harus didahulukan dan diberi prioritas. Undang-undang Anti Trust ini terus menerus disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan, sesuai dengan tahap-tahap perkembangan perekonomian Amerika Serikat. Dengan pelbagai amandemen, Undang-undang itu tetap langgeng sampai detik ini dan telah sering dipergunakan untuk menghukum kaum kapitalis raksasa yang secara naluriah memang cenderung mencari keuntungan maksimal dengan pelbagai cara yang merugikan pihak ekonomi lemah, yaitu masyarakat Amerika keseluruhan.

Dalam hal ini pun kita harus secara jujur mengakui bahwa sistem ekonomi terbuka kita masih mengandung kelemahan-ke-

lemahan. Karena itu untuk membatasi mengawasidan mengarahkannya agar tidak terjadi penyimpangan yang terlalu jauh perlu segera diadakan usaha ke arah penertiban persaingan yang terlalu bebas antara kekuatan-kekuatan ekonomi yang tidak seimbang di tanah air kita. Sudah tiba waktunya untuk mempelajari dan meninjau kemungkinan diterapkannya Undang-undang Anti Trust yang telah disesuaikan dengan kondisi dan situasi Indonesia.

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan : "Peraturan yang sama bagi pihak-pihak yang berbeda, sama tidak adilnya dengan peraturan yang berbeda-beda untuk pihak-pihak yang sama kedudukan sosial ekonominya." Ahli hukum yang waktu itu adalah Menteri Kehakiman secara tepat menguraikan asas keadilan apabila dihadapkan kepada kenyataan dan obyek yang berbeda. Untuk menghadapi obyek yang berbeda-beda, niscaya diperlukan peraturan yang berbeda-beda pula, justru untuk menjamin agar tercapai hasil akhir berupa keadilan yang hakiki. Bagi pihak yang tidak memperoleh manfaat atau dikurangi kepentingannya, peraturan sedemikian niscaya dianggap suatu diskriminasi dan karena itu akan menentang peraturan yang tidak seragam. Sebaliknya bagi pihak yang lemah, tanpa peraturan yang diskriminatif, maka jelaslah dalam alam persaingan yang memakai hukum 'the survival of the fittest' mereka akan tersisihkan tanpa kesempatan yang wajar untuk memberikan prestasi mereka.

Justru karena itulah, maka para penegak hukum di Amerika Serikat pun melihat bahwa selain pembatasan kepada kelompok kapitalis monopoli, maka para pengusaha kecil harus dibantu secara konkrit melalui kesempatan yang sengaja disisihkan untuk mereka. Di sana menurut *Small Business Act*, maka perusahaan-perusahaan kecil berhak memperoleh jaminan order bagi pekerjaan-pekerjaan pemerintah. Setiap proyek pemerintah yang nilainya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Small Business Administration dicadangkan hanya untuk perusahaan kecil yang terdaftar. Bila perlu, perusahaan kecil itu langsung dapat memperoleh penunjukan tanpa tender. Perusahaan besar dianjurkan agar membagi order dalam sub-kontrak dan memberi kesempatan kepada perusahaan-perusahaan kecil untuk menjadi



## ANALISA

supplier. Ini semua diatur dalam perundang-undangan, sehingga jaminan kelangsungan hidup perusahaan kecil, berkat order yang kontinu, sangat membantu eksistensi perusahaan kecil di Amerika Serikat.

Hal ini jelas diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menghendaki agar ekonomi kita disusun atas dasar kekeluargaan. Menurut hemat kami ekonomi kekeluargaan tidak sama dengan ekonomi yang didominasi oleh beberapa keluarga saja, melainkan harus dikuasai oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia sebagai satu keluarga besar.

Demikianlah apabila kita secara dewasa menilai situasi dunia, kondisi makro yang dihadapi Indonesia dalam percaturan ekonomi dan diplomasi internasional, maka kita dapat menarik pelajaran yang berharga untuk memperoleh bekal dalam menghadapi tantangan-tantangan historis perempat terakhir abad ke XX ini.

Sistem Ekonomi Pancasila yang hendak kita anut dan ciptakan masih harus dibentuk. Jangan sampai tidak berbobot dan merupakan wadah kosong belaka, sebab tidak ada substansi yang mengisinya. Bahaya terbesar adalah kelengahan kita sebab terlalu asyik dan sering membohongi diri sendiri dengan slogan yang tidak ada bobot dan wibawanya, sehingga tidak pernah menciptakan Sistem Ekonomi Pancasila, tapi mengambil oper penyakit eksekutif kapitalisme ke dalam tubuh ekonomi kita.

Pembentukan Sistem Ekonomi Pancasila itu harus mempertimbangkan masak-masak segenap faktor yang mempengaruhinya. Kita sebagai bangsa merdeka harus berdaulat di bidang ekonomi. Tapi sebagai bagian dari masyarakat dunia yang telah semakin saling tergantung satu sama lain, kita tidak bisa mengisolir diri. Tugas utama kita ialah meningkatkan ketahanan ekonomi nasional dengan demikian mengurangi dan memelihara batas ketergantungan kita kepada negara lain dalam taraf yang seimbang, yaitu saling membutuhkan, saling bergantung dan saling menguntungkan.

Dalam kerangka besar itulah kita harus segera mengisi Sistem Ekonomi Pancasila dengan pola operasionalnya, terma-



suk usaha pencegahan ekses kapitalisme, usaha pemerataan pendapatan agar dapat menciptakan situasi harmonis dalam masyarakat, melenyapkan ketegangan dan ketidak-adilan sosial yang menjadi sumber ketidak-puasan masyarakat. Selanjutnya pengisian secara nyata Sistem Ekonomi Pancasila dengan struktur yang tidak menimbulkan kontroversi ; pencegahan dominasi perusahaan raksasa asing agar piramida ekonomi tidak kembali seperti masa kolonial ; dan pemberian ruang gerak kepada koperasi untuk berkembang dan berprestasi. Kedua macam perundang-undangan itu boleh dikatakan merupakan penjaga garis yang mengatur agar dalam iklim persaingan bebas sesuai prinsip demokrasi liberal, tidak terjadi hal-hal yang ekstrem berupa monopoli harga dan pasaran oleh kelompok raksasa, serta merajalelanya pengangguran jika perusahaan kecil menjadi bangkrut semua karena tidak mampu bersaing. Dua penjaga garis ini memang jelas mengisyaratkan adanya ketidak-samaan hukum menghadapi obyek yang berbeda, seperti yang dikatakan Prof. Mochtar. Sistem Ekonomi Pancasila kita harus disempurnakan mekanisme kontrolnya agar tidak tergelincir ke arah liberalisme dengan pengaturan semacam itu.

Bagaimana dengan struktur perusahaan negara? Apakah itu buruk? Soalnya tidak sederhana, melainkan kembali kepada faktor mental dan 'entrepreneurship' dari pejabat yang ditugaskan memegang management perusahaan negara. Seluruh birokrat yang memimpin perusahaan negara di negara sosialis adalah manager-manager bibit unggul yang mampu berdebat dan berunding dalam tawar-menawar perdagangan yang rumit dengan rekan-rekan mereka, para direktur perusahaan multinasional Barat. Apabila di negara sosialis, para birokrat perusahaan negara mampu berdedikasi membela kepentingan nasional negara mereka dalam berunding dengan multinational corporation, maka para manager Perusahaan Negara di Negara Pancasila, justru harus membuktikan pula bahwa mereka pun sanggup mengamankan misi penting, yaitu meningkatkan ketahanan ekonomi nasional di bidang yang dipercayakan ke tangan mereka.

Tidak ada yang salah atau dosa dalam struktur perusahaan negara, yang salah adalah managementnya, atau karena tidak

## ANALISA

becus atau karena melakukan korupsi yang merupakan masalah di mana saja, dan bukan cuma monopoli perusahaan negara.

Apabila kita mau membantah teori Mahbub maka kita harus segera mengoreksi dan membuktikan bahwa strategi dan Sistem Ekonomi Pancasila walaupun merupakan ekonomi campuran, bukan liberal dan bukan komunis, melainkan cangkokan kedua unsur, kita harus mencangkok yang baik-baik saja. Kalau memang sistem pengawasan eksekutif kapitalisme Amerika Serikat yang memang berlaku di pelbagai negara industri penganut demokrasi liberal cukup efektif, kenapa kita tidak menerapkannya untuk menjinakkan modal asing di Indonesia. Bahkan kalau perlu terhadap modal nasional pun harus diadakan pengarahan agar tidak terlalu cenderung ke arah monopoli.

### III. SISTEM EKONOMI PANCASILA

Dari analisa dan studi perbandingan yang telah kita lakukan di atas maka dapat kita rumuskan suatu kerangka besar yang memuat gagasan-gagasan konkrit tentang Sistem Ekonomi Pancasila. Kerangka Besar itu seyogyanya memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Sistem Ekonomi Pancasila berakar, berkiblat dan berdasar pada falsafah bangsa dan negara kita, yaitu Pancasila.
2. Sistem Ekonomi Pancasila merupakan pengejawantahan dan penjabaran dari masing-masing Sila serta mencerminkan ketuhanan, kekompakan dan keselarasan dari keseluruhan Sila-sila tersebut.
3. Sistem Ekonomi Pancasila menolak eksekutif negatif dari dua sistem yang sudah mapan: liberalisme dan komunisme.
4. Sistem Ekonomi Pancasila merupakan keris bermata dua, yaitu cara mencapai tujuan serta tujuan itu sendiri. Dalam memperjuangkan terciptanya masyarakat adil dan makmur kita tidak boleh memakai cara-cara Machiavelistis sehingga mengorbankan prinsip keadilan demi mengejar kemakmuran belaka misalnya.

5. Sistem Ekonomi Pancasila menghormati hak dan kebebasan manusia untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya dan memiliki kemampuan ekonomi sebesar-besarnya. Prinsip ini untuk membedakan dari sistem komunisme yang mengingkari hak-hak perorangan. Dalam pada itu hak dan kebebasan berprestasi tersebut diimbangi dengan tanggung jawab moral dan sosial untuk mendayagunakan seluas mungkin kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh perorangan.

Melalui penerapan Sistem Ekonomi Pancasila itu diharapkan bangsa dan negara Indonesia dapat menumbuhkan kebanggaan dan kepercayaan pada dunia usaha Indonesia yang selama ini kurang mendapat perhatian dan tempat selayaknya dalam konstelasi kemasyarakatan kita.

Dengan Sistem Ekonomi Pancasila kita harus menarik pelajaran dari pelbagai kelemahan dan keteledoran kita mengimpor dan menjiplak sebagian sistem-sistem ekonomi yang sudah mapan. Kita harus mampu mengendalikan bahtera ekonomi nasional Indonesia di tengah gejolak ekonomi dunia. Dalam alam saling ketergantungan dan saling membutuhkan, kita harus menarik manfaat dari Tata Ekonomi Dunia Baru, untuk peningkatan taraf hidup dan martabat bangsa dan negara Indonesia.

### **Pokok-pokok pikiran tentang sistem ekonomi Pancasila (SEP)**

#### **A. Pelaku-Pelaku dan Pelaksana SEP**

Pelaku-pelaku dan pelaksana SEP sesuai dengan yang tersirat dan termaktub dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 adalah seluruh warga negara Republik Indonesia. Dalam rangka pengorganisasian diadakan penggolongan sebagai berikut :

1. Pemerintah mewakili Negara, menguasai cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti air minum, listrik, minyak bumi dan sektor produksi vital lainnya.



## ANALISA

2. Masyarakat melalui pelbagai bentuk unit usaha seperti perusahaan perorangan, koperasi dan perseroan sebagai partner pemerintah dan malahan sebagai pemegang peranan utama dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa, di luar cabang-cabang yang mutlak harus dikuasai pemerintah tersebut.
3. Unsur asing baik berupa bantuan kredit, pinjaman luar negeri dari pemerintah negara sahabat maupun investasi modal swasta asing yang beroperasi di bumi Indonesia.

### **B. Aturan Permainan bagi para Pelaku Pelaksana SEP**

1. Perusahaan-perusahaan yang dikuasai Negara sebaiknya memenuhi kriteria tersebut dalam pasal 33 UUD 45 :
  - (a) bergerak di bidang usaha yang mempunyai nilai strategis: telekomunikasi, minyak bumi;
  - (b) bergerak di bidang pelayanan masyarakat : air minum, listrik, pos, komunikasi ke seluruh wilayah yang tidak dapat dilakukan secara komersial;
  - (c) tetap memperhatikan daya mampu ekonomi nasional kita dalam arti harus efisien, sanggup membiayai keperluan operasional walaupun tidak mutlak harus memperoleh laba, (mengingat faktor non-ekonomis dari bidang usaha yang non-komersial);
  - (d) menahan diri untuk tidak ekspansionis sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat dengan unsur masyarakat swasta yang telah memiliki ruang gerak tersendiri;
  - (e) bersama pemerintah, justru perusahaan negara harus juga memberi kesempatan kepada usaha swasta untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu dikerjakan sendiri oleh pemerintah dan perusahaan negara.
2. Unsur dunia usaha swasta selayaknya juga memenuhi kriteria yang termaktub dalam pasal 33 UUD 45 :
  - a. Asas kekeluargaan menuntut sifat menahan diri pada perusahaan besar agar tidak mematikan rekan-rekan pengusaha kecil. Ini bisa dilakukan dengan mengurangi ambisi ekspansionis dan nafsu monopoli dengan memberikan kesempatan kepada perusahaan kecil untuk bertindak sebagai suplier atau sub kontraktor.

- b. Mawas diri pada dunia usaha kecil agar mengoreksi kekeliruan dan kekurangan. Tuntutan dan pemberian fasilitas berlebihan barangkali justru mengurangi disiplin, militansi, efisiensi dan produktivitas. Semua ini harus dimulai dari diri sendiri; tidak ada orang lain atau badan lain dapat menimbulkan sifat-sifat disiplin, militan, efisien dan produktif; itu hanya dapat dimulai dari diri sendiri dengan kemauan sendiri. Ini harus dilakukan agar pemberian kesempatan oleh perusahaan besar (punc 1 di atas) malah merugikan konsumen.
  - c. Petani Indonesia harus ditingkatkan kemampuannya baik melalui usaha koperasi maupun pemberian kesempatan kepada dunia usaha untuk membuka perkebunan padi. Daya beli para petani harus ditingkatkan agar dapat mendorong perkembangan ekonomi. Jangan sampai terjadi petani (melalui pembelian padi oleh pemerintah dengan harga ringan) malahan mensubsidi warga masyarakat yang tinggal di kota. Suatu pola pengembangan pertanian yang lebih terarah harus dilaksanakan.
  - d. Buruh, karyawan dan pegawai harus memperoleh jaminan kesejahteraan yang lebih baik. Dengan demikian merekapun akan meningkatkan produktivitas mereka agar produksi nasional meningkat sesuai dengan pertambahan kebutuhan serta menghasilkan surplus yang bisa diekspor.
  - e. Pemerintah dalam hal ini harus menyediakan sarana dan menegakkan kewibawaan agar prinsip-prinsip aturan permainan tersebut ditaati dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Agar tercipta kemajuan dan keserasian dan keselarasan, aturan permainan ini harus dilengkapi dengan sanksi dan dilaksanakan dengan konsekwen. Semacam Undang-undang Anti Trust dan Small Business Act (di AS) harus diciptakan dan dilaksanakan di Indonesia.
3. Unsur asing, penanam modal luar negeri, jelas harus *lebih* diawasi dan diarahkan agar kegiatan mereka betul-betul merupakan pelengkap dan tidak pengganggu dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia:

## ANALISA

- a. Pengendalian, pengarahan dan pengawasan lebih ketat terhadap arus dan kegiatan modal asing.
- b. Pelaksanaan yang lebih konkrit dari program pengalihan dan pemindahan teknologi dari luar negeri kepada unsur nasional kita harus lebih cermat dilakukan.
- c. Dua hal itu perlu untuk mengurangi taraf ketergantungan yang timpang dan berlebihan pada unsur asing, dalam peningkatan ketahanan ekonomi nasional kita. Dalam hal ini jelas diperlukan sarana pengaturan, sistem pengawasan dan pelaksanaan peraturan yang efektif. Lebih dari itu, sikap mental pemerintah dan dunia usaha kita juga harus teguh menghadapi godaan materiil unsur asing yang pasti berusaha untuk mempertahankan kepentingan mereka.

### **C. Strategi Kembar Pemerataan Pendapatan dan Peningkatan Pembangunan**

Strategi Kembar Pemerataan Pendapatan dan Peningkatan Pembangunan merupakan jawaban dari bangsa Indonesia terhadap masalah-masalah besar yang dihadapi Indonesia dalam pembangunan bangsa di tengah gejolak dan keresahan yang meliputinya.

- a.1. Pemerataan Pendapatan merupakan satu strategi yang mutlak harus dilaksanakan demi menciptakan kesetiakawanan dan kesatu-paduan dalam tubuh masyarakat dan negara Indonesia.
2. Pemerataan Pendapatan adalah satu strategi yang mutlak harus dilaksanakan apabila kita ingin mengembalikan jiwa dan semangat semasa revolusi kemerdekaan, yaitu kerelaan berkorban, kesetiaan dan perjuangan yang berkobar-kobar. Rakyat kecil harus mendapat kesempatan memperoleh porsinya tanpa ditunda lagi atau harus menunggu berputarnya hukum ekonomi yang percaya kepada akibat ganda (multiplier-effect) daripada kegiatan ekonomi rak-sasa.



3. Pemerataan Pendapatan adalah satu strategi untuk menciptakan keserasian dan keselarasan nasional yang lebih dinamis daripada sekedar kestabilan politik semu. Selain punt B.2.e. (Anti Trust dan Small Business Act) maka pemilikan saham oleh umum dari perusahaan perseroan (public company) merupakan cara efektif untuk program pemerataan pendapatan ini.
4. Pemerataan pendapatan adalah harga atau pengorbanan yang harus dibayar oleh mereka (sebagian bangsa kita), yang telah lebih dulu menikmati hasil pembangunan, kepada saudara-saudara sebangsa kita yang masih hidup menderita dan melarat agar dapat hidup lebih sesuai dengan martabat manusia. Pada gilirannya mereka yang ditingkatkan taraf hidupnya akan merupakan sumbangan besar bagi kelanjutan proses produksi. Kegairahan, ke rajinan dan ketekunan akan diperoleh dari rakyat kecil apabila mereka juga diberikan kesempatan mulai ikut menikmati hasil pembangunan.
5. Tanpa pemerataan pendapatan maka ketidak-puasan dan rasa ketidak-adilan merupakan sumber bencana dan mala-petaka yang sama sekali tidak kita inginkan. Kita tidak menghendaki bahwa komunisme mengebiri dan merampas hak-hak perorangan, tapi kita juga tidak menghendaki bahwa rakyat kecil menderita terus-menerus sementara penumpukan modal dan dan kekayaan berlangsung tanpa batas di kalangan tertentu. Apabila kita ingin memperoleh dukungan mutlak rakyat sebagaimana kita dahulu dikejar Belanda dan dilindungi penduduk kampung, maka sekarang ini kita juga harus membuktikan bahwa pembangunan ini tujuan dan hasilnya adalah demi peningkatan taraf hidup mereka. Beri kesempatan kepada mereka untuk ikut merasakan nikmat dan kebanggaan pembangunan seperti dahulu, mereka bangga dan spontan berkorban untuk perjuangan kemerdekaan. Hanya dengan jalan inilah kita dapat memperoleh dukungan mutlak serta keikut-sertaan aktif dalam pembangunan ekonomi nasional kita.

## ANALISA

- b. 1. Peningkatan pembangunan merupakan strategi yang mutlak harus dilaksanakan demi menciptakan kemungkinan dan taraf hidup yang lebih maju bagi bangsa Indonesia di tengah kehidupan antar bangsa.
2. Ketertinggalan kita selama beberapa waktu di bidang ekonomi, memang harus ditebus dengan percepatan dan peningkatan pembangunan agar kita tidak terlalu jauh di belakang bangsa-bangsa lain yang lebih muda dari kita dalam usia kemerdekaan.
3. Peningkatan Pembangunan juga mutlak harus dijalankan demi untuk membiayai program pemerataan, karena kebutuhan rakyat dan bangsa Indonesia semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif.
4. Peningkatan Pembangunan merupakan imbalan bagi bagian masyarakat yang memiliki kemampuan modal maupun ketrampilan dan telah memperoleh posisi dalam masyarakat untuk lebih meningkatkan daya mampu mereka dan dengan demikian juga meningkatkan ketahanan ekonomi nasional kita.
5. Dalam rangka itu, pemerintah berkewajiban menciptakan sarana-sarana yang diperlukan agar pengusaha kuat mampu meningkatkan peranan mereka, bukan saja di dalam negeri, tapi juga di lingkungan internasional untuk penghasilan devisa maupun kebanggaan bahwa bangsa Indonesia pun mampu bersaing di dunia bisnis raksasa pada skala global. Kesemuanya ini dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional kita agar benar-benar setiap potensi yang dimiliki bangsa kita dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya semaksimal mungkin untuk kejayaan bangsa dan negara.

### **D. Faktor-faktor Non-Ekonomi dalam SEP**

Pelaksanaan Strategi Kembar Sistem Ekonomi Pancasila ini tentunya harus didukung penuh dan melibatkan seluruh masyarakat; bukan sekedar masalah pemerintah sendiri, atau

dunia usaha belaka, melainkan seluruh lapisan masyarakat di pelbagai bidang harus turut menunjang :

1. Yang terpokok ialah apresiasi masyarakat terhadap falsafah, hakikat dan peranan dunia usaha, serta bidang ekonomi, agar kembali pada proporsi yang wajar dan tepat. Harus diubah pandangan meremehkan pengusaha, ataupun mendewakan perekonomian.
2. Pemerintah dan dunia usaha pun harus menanggapi apresiasi masyarakat tersebut dengan sebaik-baiknya. Faktor-faktor non ekonomi dalam proses pembangunan harus diperhatikan. Misalnya dengan memperhatikan keadaan lingkungan yang masih sederhana, pengusaha harus membatasi diri dari pengaruh modernisasi berupa pola konsumsi mewah. Para pejabat pemerintah pun harus menginsafi keadaan lingkungan ini dan tidak mengundang antipati dengan sikap materialistis berlebihan.
3. Setelah keduanya saling menginsafi, saling menghormati dan menyegani, serta menyadari keperluan untuk saling bekerjasama, maka harus diciptakan sarana-sarana kerjasama yang saling menguntungkan antara dunia usaha dan sektor non ekonomi, agar keduanya memperoleh manfaat maksimal.
4. Kerjasama itu dapat dilakukan oleh hampir semua unsur di semua sektor non ekonomi dengan sektor usaha.
  - Kerjasama pendidikan dan latihan untuk memperoleh tenaga-tenaga terlatih dengan dunia pendidikan
  - Kerjasama penelitian ilmiah dan riset untuk meningkatkan daya mampu bangsa Indonesia di bidang teknologi
  - Kerjasama di bidang kebudayaan antara dunia usaha dengan para seniman dan budayawan demi untuk memelihara kekayaan budaya kita, menggali kebudayaan lama serta menciptakan budaya masa depan



## ANALISA

- Kerjasama dengan setiap unsur di sektor lain atas dasar prinsip saling ketergantungan, saling membutuhkan dan saling menguntungkan, seperti di bidang olahraga, kesejahteraan sosial dan lain-lain.
5. Faktor non ekonomi yang terpenting dan bahkan lebih penting daripada faktor ekonomi, adalah sikap mental bangsa kita untuk lebih berorientasi kepada masa depan, kemajuan dan peningkatan kesejahteraan. Sikap mental yang berorientasi kepada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam hal ini jelaslah bahwa ciri-ciri negatif yang selama ini selalu dihembuskan oleh pelbagai kalangan baik secara tradisional maupun dengan gaya ilmiah cendekiawan harus kita hapuskan bersama-sama. Ciri-ciri tersebut adalah:
- Bangsa Indonesia ialah bangsa lamban, penganut falsafah alon-alon asal kelakon, berarti kurang militan, kurang disiplin, kurang efisien dan kurang produktif.
  - Bangsa dan negara Indonesia termasuk bangsa lembek (soft state & nation). Benarkah falsafah Jawa tentang keserasian dan keselarasan harus diartikan bahwa kita toleran terhadap penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan, terhadap korupsi, terhadap komersialisasi jabatan dan macam-macam kelemahan dan kekurangan?
  - Bangsa Indonesia termasuk dalam lingkungan non Sinic Culture, yang dalam proses perlombaan pembangunan dengan bangsa-bangsa di Asia Timur lainnya (termasuk Indocina/Vietnam) pasti ketinggalan karena sifat-sifat lemah tersebut di atas.

Jawaban dan bantahan terhadap ciri-ciri negatif yang dikaitkan dengan tubuh bangsa Indonesia ini harus dijawab oleh seluruh bangsa, dan tidak mungkin dibantah hanya oleh dunia usaha kita. Ini adalah tantangan nasional.

### **E. Sistem Ekonomi Pancasila dan Tata Ekonomi Dunia Baru**

1. Dalam alam saling ketergantungan dan saling membutuhkan antara pelbagai bangsa dan negara di seluruh dunia, maka harus diciptakan pola kerja-sama yang saling menguntungkan antara semua bangsa dan negara di dunia
2. Perjuangan menegakkan Tata Ekonomi Dunia Baru se योगnya didasari pula dengan tekad dari negara-negara yang sedang berkembang untuk melakukan pembangunan berlandaskan strategi kembar : pemerataan pendapatan dan peningkatan pembangunan. Hanya bila masing-masing negara berkembang mempunyai kemampuan untuk mewujudkan Tata Ekonomi Nasional Baru di dalam negeri masing-masing, maka mereka mempunyai kelebihan posisi dalam tawar menawar dengan negara-negara yang sudah maju.
3. Perjuangan menegakkan Tata Ekonomi Dunia Baru membutuhkan adanya kemauan politik dan kesediaan negara-negara maju untuk mengurangi sebagian potensi mereka dan membagikannya kepada negara-negara sedang berkembang. Kesediaan politik itu meliputi tiga masalah besar yaitu :
  - a. penyesuaian harga komoditi barang mentah, sumber alam dan mineral ;
  - b. perluasan ekspor dari negara berkembang ke negara maju ;
  - c. pengalihan teknologi dari negara maju kepada negara berkembang
4. sistem Ekonomi Pancasila yang pada tingkat nasional dengan strategi kembarnya berhasil melaksanakan pembangunan yang berkeadilan sosial, berkepentingan dengan suksesnya Tata Ekonomi Dunia Baru. Hal ini mengingatkan bahwa ekonomi Indonesia adalah bagian tak terpisahkan dari ekonomi dunia.
5. Sistem Ekonomi Pancasila tidak menghendaki konfrontasi yang pada akhirnya akan merugikan semua pihak dalam apa

## ANALISA

yang disebut pertentangan atau jurang antara negara kaya (utara) dan negara miskin (selatan). Apabila negara-negara Selatan mampu meningkatkan ketahanan ekonomi nasional masing-masing secara konkrit dan menciptakan pula ketahanan regional yang lebih tangguh, niscaya perjuangan menuntut pelbagai konsesi dari negara kaya (utara) akan diperhitungkan dan ditanggapi dengan baik, mengingat kepada asas ketergantungan dan saling membutuhkan, yang memberi tempat kepada hubungan saling menguntungkan.